

BAB 2

KEHIDUPAN NYAI DI JAWA

2.1 Latar Belakang Nyai di Jawa

Cornelis de Houtman tiba di Banten pada tahun 1595 dan berhasil membawa banyak rempah-rempah ke Belanda. Sejak itu, banyak perusahaan Belanda melakukan ekspedisi untuk mencari rempah-rempah Indonesia. Pada tahun 1601, empat belas buah ekspedisi yang berbeda diberangkatkan dari Belanda setelah armada di bawah pimpinan Jacob van Neck berhasil memperoleh keuntungan sebanyak 400% pada tahun 1599¹. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia telah menjadi sasaran dan tujuan utama para tokoh imperialis yang mencari keuntungan sebesar-besarnya bagi industri negaranya. Sebagian besar pedagang Eropa yang datang ke Indonesia menyebabkan persaingan yang sangat ketat antara pedagang dan perusahaan. Persaingan sengit antar perusahaan pelayaran niaga yang mengklaim monopoli perdagangan di Asia, khususnya di Nusantara, telah menggerus keuntungan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Belanda memutuskan untuk menggabungkan semua perusahaan pelayaran niaga tersebut menjadi satu perusahaan. Pada tanggal 20 Maret 1602 *Staten General* mengeluarkan sebuah kebijakan (*Octrooi*) pada sebuah perusahaan yang dinamakan *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (Serikat Perusahaan Perdagangan di Asia Timur)².

¹ Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008, hlm. 51.

² Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia IV: Kemunculan Penjajahan di Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2009, hlm. 29.

Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) tidak hanya menciptakan jabatan Gubernur Jenderal untuk menangani secara lebih tegas lagi urusan-urusan VOC di Asia, tetapi juga mempunyai sebuah markas besar yang tetap yaitu di Jayakarta. Nama Jayakarta sendiri kemudian diubah menjadi Batavia, Batavia diambil dari nama suku bangsa Jerman Kuno di negeri Belanda³. Setelah Jenderal Jan Pieterszoon menangkap Pangeran Jayakarta dari Wijayakarma. Pangeran Wijayakarma adalah seorang pangeran Muslim yang memerintah Jayakarta atas nama kerajaan Banten. Coen kemudian membangun benteng pertahanan, kota baru dengan model dan struktur yang meniru kota Batavia Belanda. Batavia sejak itu menjadi markas VOC. Pemerintahan Belanda yang semakin berkembang di daerah jajahan mengakibatkan banyaknya bangsa Belanda yang datang untuk mengadu nasib di wilayah jajahan Nusantara.

Perkembangan VOC sejalan dengan pembangunan kota Batavia. VOC yang dibekali dengan hak istimewa, yaitu wewenang VOC untuk mendaftar anggota atas dasar sumpah setia, melakukan peperangan, membangun benteng-benteng, dan mengadakan perjanjian-perjanjian di seluruh Asia⁴. VOC menjelma menjadi sebuah pemerintahan yang mempunyai struktur rapi bak sebuah negara bagian dari kerajaan Belanda. Pada awal pembentukannya, VOC hanyalah sebuah perusahaan yang dirancang untuk melakukan perdagangan secara monopoli antara Asia dan negeri Belanda. Pembangunan kota Batavia berjalan dengan sangat pesat. Jumlah penduduk kota Batavia meningkat sampai tiga kali lipat dalam jangka waktu

³ *Ibid*, hlm. 45

⁴ Ricklefs, *op. cit.*, hlm. 51

delapan tahun, meskipun pembangunan kota baru selesai pada tahun 1650⁵. Penduduk yang terdapat di kota Batavia pada masa itu pun semata-mata terkait dengan kegiatan VOC yang monopolistik. Menurut R. Z. Leirissa penduduk kota Batavia pada masa itu terbagi menjadi enam kategori, yaitu:⁶

1. Pegawai dan tentara VOC;
2. *Vrijburger* atau bekas pegawai atau tentara VOC yang tidak mau kembali ke tanah airnya;
3. *Mestizo* atau orang yang berdarah campuran Belanda-Asia;
4. *Mardjiker* atau bekas budak yang telah dibebaskan;
5. Orang-orang Asia (sebagian besar adalah orang Cina);
6. Berbagai etnis lain dari Nusantara.

Kedatangan beberapa pegawai VOC di Hindia Belanda mempengaruhi sistem Nyai di Hindia Belanda terutama di pulau Jawa. Sebagian besar pejabat Eropa ini datang ke Hindia Belanda sebagai lajang. Alasannya adalah karena adanya peraturan yang tidak mengizinkan untuk menikah, dan para pegawai baru Eropa ini masih belum memiliki penghasilan yang cukup untuk menghidupi keluarga Eropa mereka. Mereka berencana untuk menikahi seorang wanita Eropa setelah kembali ke tanah air mereka. Karena itu perkawinan dengan wanita pribumi tidak biasa terjadi walaupun bukan tidak pernah terdengar⁷. Di antara pegawai-pegawai Eropa tersebut ada yang memilih untuk tinggal dengan Nyai pribumi sebagai gundik.

The more well-to do officials and estate-owners could have more than one concubine, at least at the beginning of the nineteenth century: Van Reede tot de Parkeler, Governor of Java's Northeast Coast had twenty 'favourites', Van Bronckhorst, Resident of Juwana, had a 'serail', and Van Lawick van Pabst, Commissioner of Native Affairs in Buitenzorg and the Priangan, was

⁵ Hayu Adi Darmarastri, *Keberadaan Nyai di Batavia 1870-1928*, dalam *Lembaran Sejarah*, vol. 4 No. 2, 2002, hlm. 5.

⁶ *Ibid*, hlm.6.

⁷ Peter Boomgard, *Anak Jajahan Belanda: Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1880*, Jakarta: KITLV, 2004, hlm. 276.

*reported to have inspected his district with his concubines in attendance (all examples between 1800 and 1810)*⁸

Pernyataan Peter Boomgard di atas membuktikan bahwa pengambilan Nyai oleh pejabat Eropa sangat populer, tidak hanya mengambil satu Nyai, bahkan lebih dari satu. Hal ini bermula dari pemikiran bahwa memelihara Nyai dianggap lebih bermanfaat dan menguntungkan. Tidak semua orang Jawa menganggap ungkapan ini hal yang tepat, tetapi perilaku ini tidak ditanggapi dengan perlawanan secara terang-terangan. Nyai adalah simbol romansa seksual yang menjadi kunci keberhasilan kolonialisme. Sampai abad ke 20, menurut dongeng orang-orang kaya Belanda yang menetap atau bertugas ke Hindia Belanda dianjurkan untuk selekas mungkin memelihara Nyai sehingga si “majikan” dapat mempelajari bahasa, adat istiadat, dan misteri di “Timur” dengan cepat⁹. Negeri “Timur” adalah sebutan untuk wilayah koloni di Asia Timur yang jaraknya sangat jauh dari negeri Belanda, memerlukan waktu yang sangat lama untuk dapat sampai ke sana. Selain menghabiskan banyak waktu dalam perjalanannya, kondisi wilayah koloni juga masih sangat jauh terbelakang bagi bangsa Belanda. Berbagai fasilitas publik yang sudah ada di Belanda tidak dapat dijumpai di sana.

Politik pintu terbuka juga turut mempengaruhi jumlah pegawai-pegawai Eropa yang datang ke Hindia Belanda. Pembangunan ekonomi berupa perkebunan, industri pengolahan dan industri pertambangan mengakibatkan kebutuhan tenaga kerja semakin besar. Pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869 memudahkan

⁸ Peter Boomgard, *Children of the Colonial State: Population Growth and Economic Development in Java 1795-1880*, Amsterdam: Free University Press, 1989, hlm. 159.

⁹ Onghokham, *Kekuasaan dan Seksualitas: Lintasan Sejarah Pra dan Masa Kolonial*, dalam *Prisma* No. 7 Tahun XX, Juli 1991, hlm. 18.

migrasi pejabat Eropa ke Hindia Belanda. Pada awalnya, sebagian besar imigran Eropa adalah anggota kelompok militer, yang besarnya tergantung pada situasi perang di Hindia Belanda. Akan tetapi semenjak perdagangan, perkebunan, dan industri di Hindia Belanda mengalami pertumbuhan pesat di akhir abad 19 dan awal abad 20, maka kehadiran imigran para kapitalis dan profesional sipil Eropa semakin banyak jumlahnya¹⁰. Meningkatnya arus kedatangan orang-orang Eropa ke Jawa baik sebagai pejabat pemerintah kolonial maupun sebagai pengusaha swasta penanaman modal pada industri perkebunan, telah menimbulkan derasnya arus modernisasi gaya hidup. Sebenarnya praktik pengambilan Nyai sudah banyak terjadi di kalangan para pedagang Asia dan Portugis ketika jumlah kaum pria Belanda atau Eropa tidak sebanding dengan jumlah kaum wanita Belanda dan Eropa yang ada¹¹. Jumlah perempuan Belanda atau Eropa yang lebih sedikit menyebabkan meluasnya praktik pengambilan Nyai selama pemerintahan Belanda di Hindia Belanda sejak pembentukan VOC di Batavia. Perlu dicatat bahwa kebutuhan seksual menjadi salah satu sebab hadirnya Nyai di ranah perkebunan, di dunia sipil dan di tangsi-tangsi militer.

2.2 Kondisi Jawa pada Tahun 1870-1942

Dari tahun 1870 hingga 1942, beberapa peristiwa penting terjadi di negara Indonesia. Meskipun Negara Kesatuan Republik Indonesia belum terbentuk, perubahan besar bagi pribumi telah dimulai pada tahun ini. Peristiwa awal adalah dihapuskannya *cultuurstelsel* yang disebut juga Sistem Tanam Paksa yang

¹⁰ Bedjo Riyanto, *Iklan dan Surat Kabar dan Perubahan Masyarakat di Jawa Masa Kolonial (1870-1915)*, Yogyakarta: Tarawang Press, 2000, hlm. 40.

¹¹ *Ibid*, hlm. 7.

dicetuskan oleh Van den Bosch, yang hakikatnya adalah bahwa penduduk sebagai ganti membayar pajak tanah sekaligus, harus menyediakan sejumlah hasil bumi yang nilainya sama dengan pajak tanah itu¹² dan digantikan dengan politik kolonial Liberal. Politik kolonial Liberal ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria pada tahun 1870, kemudian disusul politik Ethis dan berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia pada 1942.

1. Politik Kolonial Liberal

Tahun 1870 merupakan periode penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Bisa dikatakan tahun ini mulai terjadi modernisasi di Hindia Belanda, khususnya di Pulau Jawa. Periode antara 1870 sampai 1900 dianggap sebagai periode liberal dalam sejarah kolonial. Ini berarti saat negara menyerahkan peran ekonominya (tanam paksa, monopoli rempah-rempah) dan menyerahkan eksploitasi ekonomi kepada modal swasta. Pemerintah hanya bertindak sebagai wasit atau penjaga keamanan yang dilakukan melalui birokrasi dan tentaranya¹³. Sejak tahun ini Hindia Belanda telah mengalami perubahan yang sangat besar, banyaknya pihak swasta yang datang ke Hindia Belanda membawa pengaruh modernisme dari berbagai negara.

Hingga tahun 1870, rakyat menderita akibat sistem *cultuurstelsel* yang merenggut kehidupan rakyat. Masalah muncul sebagai akibat dari sistem *cultuurstelsel* ini menimbulkan konflik di Belanda. Karena sistem ini, Belanda

¹² Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme Jilid 2*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999, hlm. 13.

¹³ Mukhlis Paeni, *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem Sosial*, Jakarta: Rajagrafindo, 2009, hlm. 230-231.

mengalami surplus finansial, tetapi tidak dibenarkan karena dianggap menindas orang Jawa. Penindasan ini dianggap tidak manusiawi karena mempekerjakan orang pribumi tanpa upah, orang pribumi diharuskan bekerja tanpa upah yang setimpal.

Tahun 1860, seorang mantan pejabat kolonial, Eduard Douwes Dekker menerbitkan sebuah novel yang berjudul *Max Havelaar* dengan nama samaran 'Multatuli'¹⁴. Buku ini bercerita tentang penindasan pemerintahan kolonial kepada masyarakat pribumi melalui sistem pembangunan Jawa. Di Jawa abad ke-19, buku ini menjadi senjata ampuh melawan rezim kolonial. Kemunculan novel dengan latar belakang situasi riil masyarakat Hindia Belanda telah memberikan opini masyarakat dunia khususnya kaum liberal. Tanam paksa ini dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan mendapat kecaman dari berbagai kalangan. Perdebatan kalangan liberal dengan kalangan konservatif yang ingin menghapus sistem budidaya akhirnya mencapai kesepakatan, yaitu menghapus sistem tanam paksa sedikit demi sedikit. Kalangan konservatif adalah kelompok yang tetap ingin mempertahankan sistem tanam paksa, karena Belanda sudah meraup untung besar. Penghapusan dimulai dengan komoditi yang menghasilkan profit paling sedikit atau produk non profit.

Perubahan besar dalam masyarakat pribumi terjadi setelah kelompok liberal yang didukung borjuis mengambil posisi ekonomi dan politik yang kuat sampai tahun 1880-an. Kemudian kerja paksa dihapuskan dan diganti dengan kerja bebas.

¹⁴ Ricklefs, *op. cit.*, hlm. 270.

Kepentingan politik kaum Liberal memiliki dampak ekonomi pada koloni, menciptakan infrastruktur kolonial seperti kereta api, trem, layanan pos, bank, dan perusahaan swasta. Usaha golongan liberal berjalan lancar dan keuntungan juga diperoleh dengan mudah¹⁵. Seiring dengan perkembangan Hindia Belanda, wilayah koloni mulai termodernisasi. Modernisasi ini didukung dengan datangnya banyak pejabat Eropa di Hindia Belanda setelah dibukanya Terusan Suez pada tahun 1869.

Usaha golongan liberal mendapat jalan setelah pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Undang-Undang Agraria pada tahun 1870. Undang-undang ini pada dasarnya melarang penjualan tanah kepada orang asing tetapi mereka hanya diperkenankan menyewanya dalam jangka waktu 75 tahun¹⁶. Setelah itu pihak-pihak swasta berbondong-bondong datang ke Hindia Belanda untuk membangun berbagai pusat ekonomi seperti perusahaan-perusahaan perkebunan (*onderneming*), industri-industri manufaktur, industri pertambangan, serta jaringan distribusi perdagangan. Sejak diterapkannya Undang-undang Agraria, terjadilah proses swastanisasi dan modernisasi perekonomian dalam masyarakat Hindia Belanda¹⁷. Maka semakin kuatlah peranan pengusaha ataupun investor swasta dalam perekonomian kolonial di Hindia Belanda.

Pulau Jawa yang menjadi pusat Pemerintahan Hindia Belanda, mengalami perkembangan pesat. Hutan telah ditebang dan diganti dengan perkebunan di berbagai bagian Jawa. Pabrik gula dibangun dengan baik, dan jalur kereta api serta jalan raya yang menghubungkan kota diperluas untuk memfasilitasi mobilisasi.

¹⁵ Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 14.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Bedjo Riyanto, *op.cit.*, hlm. 31.

Dengan perkembangannya yang pesat, pulau Jawa menjadi pusat kegiatan pemerintahan Belanda di Hindia Belanda.

Perkembangan sejak tahun 1870 menyebabkan banyak perubahan lainnya. Jaringan komunikasi (jalan) membawa pedesaan lebih dekat ke pusat-pusat administrasi. Hasil dari sistem komunikasi ini adalah munculnya interaksi yang lebih besar antara pedesaan dan perkotaan. Selain itu, terjadi interaksi antara satu pulau dengan pulau lainnya, khususnya antara pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya. Dibandingkan dengan zaman sebelumnya, orang dapat diangkut dalam jumlah besar dalam waktu yang relatif singkat.

Sejak saat itu, masyarakat suku mulai bersatu, terutama di perkotaan. Migrasi manusia dari pulau lain ke Jawa atau dari desa ke pusat ekonomi seperti perkebunan dan pabrik berkembang pesat. Migrasi ini terutama dilakukan oleh para lajang yang bertekad untuk mencari pekerjaan. Banyaknya laki-laki lajang di perkebunan menyebabkan praktik pengambilan Nyai di perkebunan swasta. Di pedesaan juga semakin banyak orang Belanda, di pedesaan jaringan administrasi semakin diperluas. Ini berarti bahwa bentuk-bentuk pemerintahan Barat secara bertahap menggantikan aspek-aspek tertentu dari bentuk-bentuk pemerintahan tradisional. Jelaslah bahwa modernisasi dan kemajuan kehidupan ekonomi sejak tahun 1870-an dan seterusnya merupakan hasil nyata dari praktik pernyaaian.

2. Politik Ethis

Fase penting dalam sejarah bangsa Indonesia adalah dimulainya politik etis yang berdampak kuat pada pergerakan nasional Indonesia. Kebijakan ini juga dikenal sebagai Politik Etika, yang dibuat oleh Van Deventer pada tahun 1901.

Orang sering mengaitkan timbulnya sistem Politik Ethis dengan tulisan Van Deventer dalam majalah *De Gids* (Nomor 63, tahun 1899) yang berjudul *Een Eereschuld* atau “Hutang Budi”¹⁸, setelah Ratu Belanda melontarkan pernyataan bahwa negeri Belanda mempunyai kewajiban untuk mengusahakan kemakmuran serta pengembangan sosial dan ekonomi penduduk pribumi¹⁹. Politik etis digunakan untuk mengubah sistem liberal menjadi sistem yang dapat digunakan sebagai sarana pemerintahan untuk dapat ikut campur urusan rakyat.

Politik Ethis menggunakan tiga sila sebagai slogannya, yaitu Irigasi, Edukasi, dan Emigrasi²⁰. Perkebunan tebu membutuhkan penyiraman yang intensif. Banyak pabrik, kantor perdagangan dan industri lainnya membutuhkan banyak tenaga kerja. Tenaga kerja ini tidak hanya dibutuhkan di pulau Jawa, tetapi juga di provinsi-provinsi di luar Jawa, sebagai daerah-daerah baru yang dikembangkan untuk perkebunan modern. Pembentukan dan perluasan birokrasi pemerintah kolonial membutuhkan staf tingkat bawah di pemerintahan sipil (*Binnenlands Bestuur*) atau di Kementerian Dalam Negeri pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kebutuhan dan desakan kuat golongan Liberal dan Kaum Ethis mempercepat pemerintah kolonial untuk mendirikan sekolah-sekolah yang berderajat rendah bagi masyarakat pribumi²¹. Sekolah-sekolah pribumi atau sekolah desa mulai muncul pada akhir abad ke-19, dan baru pada awal abad ke-20 sekolah menengah dan sekolah tingkat tinggi.

¹⁸ Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hlm. 32.

¹⁹ Encyclopedia, *Politik Etis*, Tersedia pada www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/2406/Politik-Etis, diakses pada tanggal 28 April 2022, pukul 12.59 WIB

²⁰ Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hlm. 32.

²¹ Bedjo Riyanto, *op.cit.*, hlm. 41.

Penerapan sistem pendidikan Barat secara struktural telah mempercepat proses modernisasi guna menopang strata sosial masyarakat Jawa saat itu. Model hubungan sosial yang baru dibentuk oleh proses industrialisasi, komersialisasi pertanian dan perkebunan, sebagai akibat dari sistem birokrasi, urbanisasi, perluasan infrastruktur dan mobilisasi sosial. Kesimpulannya, stratifikasi tidak hanya terjadi dalam hubungan sosial, bahkan dalam pencarian kerja. Posisi terendah dalam birokrasi adalah pribumi, dan pemerintahan dengan jabatan tinggi dikuasai oleh orang Eropa.

Pada awal abad ke-20 tingkat interaksi antara warga kulit putih dengan masyarakat pribumi yang semakin tinggi menyebabkan munculnya golongan Indo Eropa. Golongan tersebut merupakan hasil keturunan campuran antara Belanda/Eropa asli dengan wanita pribumi yang berstatus gundik atau Nyai²². Golongan Indo secara hukum termasuk dalam status golongan Eropa, namun sebenarnya golongan Eropa tidak mau menyamakan status dengan golongan mestizo ini. Dalam kehidupan, masyarakat Indo sendiri lebih fokus pada budaya Eropa. Mereka mencoba untuk menghindari nenek moyang dari pihak ibu, yang merupakan keturunan dari pribumi.

2.3 Munculnya Nyai di Jawa

Praktek pengamblan Nyai di zaman penjajahan sudah bukan hal yang tabu lagi, status Nyai bahkan sudah menjadi dambaan para gadis pribumi agar bisa merubah status sosialnya menjadi lebih tinggi. Meski masih ada kelompok masyarakat pribumi dan kolonial yang menentangnya. Apalagi di masyarakat

²² Bedjo Riyanto, *op.cit.*, hlm. 49.

pedesaan dimana perkawinan dianggap sangat penting bagi masyarakat yang tertib, harmonis dan produktif. Seperti yang diungkapkan oleh Peter Boomgard;

*In such a society concubinage, at least among the indigenous population, was taboo. Earlier writers do not mention it all, either because it was too absurd a notion, or because it had escaped their attention. Later no a number of authors stated that concubinage was not permitted, but other sources suggest that it was much in evidence. It could be that concubinage was restricted to specific groups: Poensen, whose material came from Kediri, mentioned it as a typical urban phenomenon, and Krawang, where the Resident reported the frequent occurrence of *ublawfu*; unions, had a large proportion of people engaged in fishing, slat-making, industry, commerce and trade. Concubinage, no doubt as much a source of trouble as the presence of many bachelors, may indeed have been virtually absent from most villages.²³*

Penduduk desa menginginkan masyarakat yang damai seperti yang disebutkan di atas, memelihara selir atau gundik dianggap tabu. Beberapa penulis menyatakan bahwa dilarang memiliki Nyai atau selir, tetapi sumber lain menunjukkan bahwa banyak yang melakukannya. Posisi Nyai dibatasi hanya untuk golongan tertentu saja. Di perkotaan dan beberapa kawasan industri, memiliki Nyai memang tidak bisa dihindari, yang menjadi sumber ketakutan bagi banyak orang yang masih lajang. Bahkan, sejak awal tahun 1600-an, banyak pejabat kolonial yang memelihara lebih dari satu Nyai. Seorang gubernur di pesisir Laut Jawa dikatakan telah memelihara Nyai yang merupakan dua puluh wanita pribumi. Kemudian disebut-sebut pula nama pejabat lain yang memelihara Nyai, yaitu Van Reed, Residen Juwana, Van Lawick, dan seorang pejabat Komisi Urusan Bumiputra di Buitenzorg. Semua contoh ini diambil dari tahun 1800-1810²⁴.

²³ Peter Boomgard, *Children of the Colonial State: Population Growth and Economic Development in Java 1795-1880*. Amsterdam: Free University Press, 1989, hlm. 143.

²⁴ Linda Christanty, *Nyai dan Masyarakat Kolonial Hindia Belanda*, dalam *Prisma*, No. 10 Tahun XXIII Oktober, 1994, hlm. 25.

Terdapat beberapa penyebab mengapa praktik pengambilan Nyai tumbuh begitu kuat di tanah jajahan, antara lain;

1. Jumlah Laki-laki Eropa atau Belanda Lebih Banyak Dibandingkan Jumlah Perempuan Eropa atau Belanda.

Pada awalnya sistem pernyaaian mulai marak di Batavia pada masa pemerintahan VOC meskipun sesungguhnya jauh sebelum Belanda tampil di Asia. Praktik pergundikan sudah banyak terjadi di kalangan para pedagang Asia dan Portugis ketika jumlah kaum pria Belanda atau Eropa tidak sebanding dengan jumlah kaum wanita Belanda atau Eropa yang ada²⁵. Hal ini menjelaskan bahwa para pendatang dari Eropa adalah laki-laki, baik laki-laki yang masih lajang atau laki-laki yang sudah menikah, tetapi tanpa membawa istri dan anak ke negara jajahan. Membawa istri Eropa akan menyebabkan masalah ekonomi dan sosial di kemudian hari di tanah jajahan. Anggapan ini semakin menjadi alasan mengapa para pegawai Belanda atau Eropa memilih pergi ke daerah jajahan sendirian tanpa ditemani pasangan atau keluarga. Mereka hanya ingin mengumpulkan uang sebanyak mungkin, sehingga jika suatu hari dia kembali ke negara asalnya, mereka dapat menikmati sisa hidup santai dengan wanita Eropa yang dia inginkan. Alasan lain orang Eropa enggan membawa keluarganya ke daerah jajahan adalah perbedaan iklim Eropa dengan daerah tropis seperti Indonesia. Selain itu, perjalanan laut yang panjang, sekitar 7-10 bulan, dan melelahkan, terkadang disertai cuaca yang tidak menyenangkan dan berbahaya. Bepergian dengan cara seperti ini

²⁵ Hayu Adi Darmarastri, *op. cit.*, hlm. 7.

tentu sangat berbahaya bagi para wanita, terutama orang Eropa yang sangat rentan dan tidak terbiasa dengan iklim tropis.

Setelah dibubarkannya VOC pada tahun 1799, pemerintahan diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Sistem eksploitasi dan monopoli yang ditinggalkan VOC dilanjutkan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan bertambahnya kekuasaan di Nusantara. Ekspansi terjadi di bidang ekonomi, politik, militer dan penyebaran agama Kristen. Maka dibutuhkan tambahan personil militer dan sipil, yang didatangkan dari Belanda, negara-negara Eropa lainnya atau melalui perekrutan orang pribumi.

Pada abad ke-19, para pendatang Eropa menyebut kota Batavia dengan iklim kota yang buruk, kabut yang beracun, parit yang tercemar, dan penyakit-penyakit aneh dengan nama seram, seperti *remitterende rotkoortsen* (demam maut), *roode loop* (berak-berak merah), *febre ardentes*, *malignae et putridae*, dan *mort de chien* (demam parah, jahat da busuk, dan mati mendadak)²⁶. Karena itu, pendatang Eropa yang datang ke Batavia mayoritas adalah kaum laki-laki, walaupun sudah ada peningkatan jumlah pendatang kaum perempuan Eropa sebelumnya.

Jumlah wanita asing tidak sebanding dengan jumlah lelaki asing di Hindia Belanda dapat dilihat dari sensus penduduk yang dilaksanakan pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu. Berikut ini merupakan tabel sensus penduduk pada tahun 1800 hingga 1930.

²⁶ Linda Christanty, *op. cit.*, hlm. 29.

Tabel 2.1
Jumlah Wanita Asing pada Setiap 1000 Pria di Hindia Belanda dari Tahun 1800 sampai 1930

Tahun	Eropa	China	Arab
1860	-	590	809
1880	481	620	830
1900	636	548	857
1905	672	526	890
1920	800	563	865
1930	884	646	841

Sumber: Creutzberg dan van Laanen, *Sejarah Statistik Ekonomi Indonnesia*, Jakarta: Yayasan Obor, 1987, hlm. 33.

Sensus penduduk yang dilkakukan oleh pemerintah Kolonial Belanda di Hindia Belanda pada tahun 1920 dan 1930 juga masih menunjukkan bahwa jumlah laki-laki Eropa lebih banyak dibanding perempuan Eropa meskipun jumlah perempuan Eropa yang datang ke Hindia Belanda telah mengalami peningkatan, tetapi dalam hal jumlah laki-laki Eropa di Hindia Belanda lebih banyak. Dari tiga buku sensus penduduk Hindia Belanda oleh pemerintah Belanda dapat disimpulkan sebagai berikut.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Laki-laki Eropa dan Perempuan Eropa di Batavia pada Tahun 1920 dan 1930

Wilayah	Tahun 1920		Tahun 1930	
	L	P	L	P
Batavia	13.390	11.290	16.179	15.243

Sumber: Volkstelling 1930, *Deel II Inheemsche Bevolking Van West-Java en Batavia, Census of 1930 In Netherlands India, Volume I*, 1934, Batavia: Departement Van Economische Zaken.

Batavia merupakan daerah penting bagi pertumbuhan penduduk Eropa di Hindia Belanda. Kota yang menjadi pusat pemerintahan Belanda di wilayah jajahan Hindia Belanda ini menjadi basis pertumbuhan penduduk Eropa. Dibuktikan bahwa penduduk Eropa di Jawa Barat, hampir 50 persen penduduk Eropa tinggal di Batavia. Batavia bukan hanya tempat peristirahatan orang Eropa yang datang ke Hindia Belanda, tetapi juga tempat menetap orang kulit putih.

Jumlah perempuan di Batavia dari tahun 1920 sampai tahun 1930 mengalami peningkatan, karena memang sejak dibukanya terusan Suez perempuan Eropa lebih banyak dikirim ke wilayah koloni. Dalam kurun waktu 10 tahun, jumlah perempuan meningkat tajam, dari 11.290 hingga 15.243. peningkatan jumlah perempuan Eropa yang datang ke Hindia Belanda ternyata masih belum bisa mengimbangi jumlah laki-laki Eropa. Jumlah kaum perempuan Eropa tetap lebih sedikit di antara jumlah laki-laki Eropa.

Perbandingan jumlah perempuan Eropa dan laki-laki Eropa di Jawa Barat pada sensus penduduk tahun 1930 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Eropa di Jawa Barat pada Tahun 1920 dan 1930

Wilayah	Tahun 1920		Tahun 1930	
	L	P	L	P
Jawa Barat	30.098	24.329	42.606	38.168

Sumber: Volkstelling 1930, *Deel II Inheemsche Bevolking Van West-Java en Batavia, Census of 1930 In Netherlands India, Volume I*, 1934, Batavia: Departement Van Economische Zaken.

Perbandingan jumlah perempuan Eropa dan laki-laki Eropa di Jawa Tengah pada sensus penduduk tahun 1930 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Eropa di Jawa Tengah
pada Tahun 1920 dan 1930

Wilayah	Tahun 1920		Tahun 1930	
	L	P	L	P
Jawa Tengah	14.726	13.229	18.313	16.313

Sumber: Volkstelling 1930, *Deel II Inheemsche Bevolking Van West-Java en Batavia, Census of 1930 In Netherlands India, Volume I*, 1934, Batavia: Departement Van Economische Zaken.

Perbandingan jumlah perempuan Eropa dan laki-laki Eropa di Jawa Tengah pada sensus penduduk tahun 1930 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Eropa di Jawa Timur
pada Tahun 1920 dan 1930

Wilayah	Tahun 1920		Tahun 1930	
	L	P	L	P
Jawa Timur	23.254	19.219	33.169	30.130

Sumber: Volkstelling 1930, *Deel II Inheemsche Bevolking Van West-Java en Batavia, Census of 1930 In Netherlands India, Volume I*, 1934, Batavia: Departement Van Economische Zaken.

Pada 4 tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah pria Belanda atau Eropa lebih banyak daripada jumlah wanita Belanda atau Eropa. Penduduk Eropa di atas dihitung berdasarkan jumlah penduduk Eropa di setiap kota di wilayahnya masing-masing yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari tahun 1920 hingga 1930 terjadi peningkatan jumlah wanita Eropa di pulau Jawa. Dibandingkan dengan orang Eropa yang tiba di Hindia Belanda, jumlah wanita Eropa sangat jauh berbeda. Jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun, didukung sejak dibukanya Terusan Suez

pada tahun 1869. Seiring dengan semakin cepat dan mudahnya perjalanan ke daerah jajahan di Asia, pengangkutan wanita Eropa ke Timur menjadi lebih umum.

Perbandingan yang tidak seimbang antara jumlah pria Eropa dan wanita Eropa, cenderung menimbulkan masalah bagi pria di Hindia Belanda. Memiliki istri orang Belanda atau Eropa adalah dambaan bagi pria Belanda atau Eropa. Karena kebutuhan akan wanita Eropa tidak dapat dipenuhi, beberapa orang Eropa memilih untuk tinggal Bersama Nyai atau selir mereka yang sambil menunggu istri orang Eropa. Mengambil Nyai adalah solusi untuk jumlah pria dan wanita Eropa yang tidak seimbang.

2. Peraturan gereja yang tidak memperbolehkan terjadinya pernikahan beda keyakinan

Pada zaman kolonial hingga tahun 1848, peraturan keagamaan dipergunakan sebagai pedoman dalam hal-hal perkawinan campuran. Sesuai dengan struktur masyarakat yang terdapat pada waktu itu, agama yang dianut oleh orang Eropa adalah agama Nasrani yang dijadikan sebagai pedoman atau pegangan²⁷. Agama digunakan untuk melindungi Belanda. Kekristenan adalah *trait d'union* dalam masyarakat kolonial. Pemerintah VOC menginginkan penduduk yang menaati peraturan dan mematuhi norma-norma Kristen. Tugas Gereja menjadi sangat rumit yaitu pencatatan kelahiran, perkawinan, kematian, pendidikan dan pemeliharaan, semua ini menjadi tanggung jawabnya. Akibatnya gereja menjadi benar-benar

²⁷ Gautama, *Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Tjampuran (Staatsblad 1898 No 158)*, Bandung: Penerbit Alumni, 1973, hlm.3.

berakar di dalam masyarakat, lebih dari yang diduga oleh para pengamat di abad ke-20²⁸.

Proses pengkristenan pribumi juga dicoba dengan dikeluarkannya berbagai peraturan dan iming-iming mendapatkan keuntungan. Penduduk asli yang berpindah ke Kristen menerima sedikit kompensasi finansial. Selain itu, karena hutang, orang Kristen pribumi tidak dapat dijual sebagai budak, dan budak Kristen tidak dapat dijual kepada tuan non-Kristen. Hanya sesudah pindah agama perempuan pribumi bisa menikah dengan laki-laki Belanda atau Eropa²⁹. Bahkan dapat dikatakan bahwa orang golongan rendahan dapat beralih ke pihak atas dengan jalan memeluk agama Kristen ini.

Sebelum tahun 1848 sebuah pernikahan antara seorang Eropa Kristen dengan seorang perempuan pribumi non-Kristen merupakan hal yang dilarang³⁰. Namun seiring perkembangan zaman, lambat laun kriteria agama dan larangan kawin campuran tidak dapat dipertahankan. Akhirnya perkawinan campuran tidak lagi dilarang, hanya menjadi hal yang tidak diinginkan. Perkawinan campuran merupakan fenomena sosial yang sering terjadi antara pria Eropa dan wanita pribumi dalam hubungan Nyai. Hal ini sudah menjadi hal yang lumrah, namun kenyataannya sebagian masyarakat Eropa masih menentang perkawinan campuran.

Seorang laki-laki Eropa Kristen harus menikahi seorang perempuan Kristen pula. Jadi jika laki-laki Eropa Kristen menginginkan menikah dengan seorang

²⁸ Leonard Blusse, *Persekutuan Aneh: Pemukiman Cina, Wanita Peranakan, dan Belanda di Batavia VOC*, Yogyakarta: LkiS, 2004, HLM. 311.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Reggie Baay, *Nyai dan Pergundikan di Hindia Belanda*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2010, hlm. 71.

perempuan pribumi, perempuan tersebut haruslah beragama Kristen. Apabila perempuan tersebut adalah seorang budak, maka si laki-laki harus menebus kemerdekaan perempuan pilihannya kemudian dibaptis, baru setelah itu boleh menjadi istri laki-laki bersangkutan. Sebagai ganti peralihan agamanya, ia memperoleh kewarganegaraan suaminya. Anak-anak mereka hanya boleh dibaptis jika ibu mereka orang Kristen yang aktif menganut agamanya³¹. Rezim semacam ini telah mendorong lahirnya hubungan tanpa ikatan antara laki-laki Eropa dengan perempuan Asia.

Praktik pengambilan Nyai semakin diminati oleh laki-laki Eropa ketika perempuan-perempuan pribumi yang beragama islam lebih enggan untuk pindah agama ke Kristen. Karena keadaan itu, banyak lelaki Eropa yang tak pernah menikahi secara resmi perempuan pribumi, melainkan hidup dengannya sebagai gundik atau Nyai.

3. Memelihara seorang nyai dianggap lebih mudah dan menguntungkan dibandingkan menikah secara resmi dengan seorang perempuan pribumi.

Para pegawai Eropa yang tiba ke tanah koloni di Asia berarti mereka memiliki tingkat tekad dan keberanian yang sangat tinggi. Selain menempuh perjalanan berbulan-bulan di lautan yang sangat jauh, perbedaan iklim dengan negara asal menjadi tantangan serius. Tidak hanya perbedaan iklim, tetapi juga perbedaan bahasa, adat istiadat dan budaya dengan negara asal dan daerah jajahan menjadi

³¹ Tineke Hellwig, *Citra Kaum Perempuan di Hindia Belanda*, Jakarta: Yayasan Obor, 2007, hlm. 35.

alasan mengapa pegawai Eropa harus memikirkan matang-matang untuk mau dikirim ke daerah jajahan.

Obsesi untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya menyebabkan pegawai Belanda atau Eropa tidak hanya tinggal beberapa bulan di daerah jajahan. Para pekerja Eropa akan melanjutkan karir mereka selama bertahun-tahun atau bahkan seumur hidup, sehingga mereka harus mampu beradaptasi dengan lingkungan baru koloni, yaitu Hindia Belanda. Situasinya rumit karena kebanyakan dari mereka datang sendiri tanpa ditemani pasangan atau keluarganya. Sebagian besar pegawai Eropa yang datang masih lajang. Akhirnya mereka harus berjuang sendiri di tanah baru yang sangat berbeda dari negara maju mereka. Tanah-tanah jajahan di Asia oleh orang-orang Eropa dianggap daerah terbelakang dan fasilitasnya kurang.

Memilih hidup membujang di tanah koloni dianggap sebagai keputusan yang tepat mengingat kondisi finansial para pegawai Eropa ini belum memungkinkan untuk menanggung sebuah keluarga. Apalagi sebuah keluarga yang bergaya hidup Eropa yang senang dengan kemewahan. Fasilitas-fasilitas hidup di tanah jajahan seperti sekolah untuk anak-anak yang sangat terbatas, kondisi rumah sakit, dan tempat tempat hiburan juga tidak sesuai dengan ukuran kehidupan orang Eropa. Alasan tersebut semakin memperkuat alasan seorang pegawai Eropa memilih untuk tidak menikah.

Bukan berarti para pegawai Eropa ini tidak membutuhkan bantuan orang lain untuk mengurus rumah dan melayaninya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengatasinya mereka biasanya mengambil seorang perempuan pembantu rumah

tangga dari kalangan pribumi. Semakin lama, perempuan pribumi itu tidak hanya membantunya dalam mengurus rumah tangga, tetapi juga melayani kebutuhan biologis sang tuannya. Perempuan-perempuan inilah yang dipanggil dengan Nyai.

Memiliki Nyai dianggap lebih mudah dan lebih menguntungkan daripada menikahi wanita Eropa secara sah. Nyai mudah untuk ditinggalkan dan dapat diperlakukan semaunya. Nyai juga bisa digunakan untuk menjaga kesehatan para tuan Eropa dibandingkan dengan pelacur yang tidak dijamin bersih dari berbagai penyakit menular seksual seperti sipilis dan kencing nanah. Hal ini dikarenakan semakin maraknya praktik pelacuran di masa itu yang ditandai dengan bertambah banyaknya jumlah kompleks pelacuran terutama di sekitar barak-barak tentara Belanda. Memelihara nyai juga dianggap lebih terhormat bagi seorang pejabat tinggi dibandingkan jika ia berkunjung ke kompleks pelacuran³².

Reggie Baay menjelaskan dalam bukunya dengan lebih rinci:

Gubernur Jenderal yang memimpin dari 1650 sampai 1653, Carel Reyniersz, dan penggantinya, Joan Maetsyker, merupakan pendukung kuat perkawinan antara pegawai VOC dengan perempuan Asia atau Eurasia. Menurut mereka ada berbagai keuntungan dari hal tersebut. Para perempuan Asia lebih menguntungkan daripada perempuan-perempuan Eropa karena biaya pelayaran perempuan Eropa tentu harus ditanggung oleh laki-laki sendiri. Keterikatan dengan tanah kelahiran membuat para perempuan pribumi ingin tetap tinggal di Timur sehingga mereka pasti akan membujuk suami mereka untuk melakukan hal serupa.

Jelas bahwa pengambilan Nyai atau perempuan pribumi pada saat itu sangat bermanfaat bagi pegawai kolonial. Namun kelemahannya adalah hubungan Nyai harus didasarkan pada ketertarikan antara keduanya. Meskipun hanya ada beberapa hubungan berdasarkan cinta antara orang Eropa dan wanita pribumi. Hubungan

³² Hayu Adi Darmarastri, *op.cit.*, hlm. 15.

yang berkembang selama praktek pengambilan Nyai adalah mutualisme. Baik orang Eropa maupun perempuan pribumi sama-sama mendapat manfaat, walaupun tidak bisa dibandingkan dengan manfaat antara orang pribumi dengan orang Eropa. Dibandingkan dengan wanita Belanda atau Eropa, wanita Asia (dalam kasus ini) tidak terlalu serakah. Mereka puas meski upahnya rendah. Perkawinan campuran ini akan menghasilkan anak di masa depan, di mana satu pria akan menjadi pegawai potensial dan satu anak perempuan akan menjadi calon pengantin yang cocok untuk generasi baru pegawai Belanda.

Kehadiran nyai pribumi juga dimanfaatkan untuk memperoleh pengetahuan mengenai kebudayaan Melayu, baik dalam bidang bahasa, kebiasaan, maupun adat istiadatnya³³. Dalam dunia perdagangan dan pergaulan resmi, orang Belanda atau Eropa harus berkomunikasi dan berinteraksi dengan pribumi. Kehadiran nyai dapat membantunya memahami dan mempelajari kehidupan masyarakat dan pemikiran masyarakat Indonesia. Seorang nyai adalah kamus berjalan tentang budaya asli untuk para tuan Eropa. Manfaat lainnya adalah pengetahuan tentang pengobatan tradisional nyai. Nyai dapat membantu tuan-tuan Eropa mengatasi ancaman penyakit tropis karena jumlah obat yang tersedia. Meski menderita penyakit ringan, orang Eropa pada umumnya lebih memilih menggunakan pengobatan tradisional daripada berkonsultasi dengan dokter spesialis pengobatan Barat. Para ahli pengobatan tradisional dari tumbuhan atau akar-akar alami, baik yang benar-benar ahli atau hanya pengetahuan turun-temurun, kebanyakan adalah perempuan.

³³ *Ibid.*

Melalui para nyai, orang-orang Belanda atau Eropa mendapat kesempatan untuk tetap bertahan di lingkungan yang baru³⁴. Melalui bantuan para nyai itu pula tuan-tuan Eropa memperoleh pengertian tentang kehidupan masyarakat serta alam pikiran bangsa Indonesia. Selain itu kita perlu tahu bahwa nyai juga berperan sebagai agen budaya. Nyai menjadi sebuah mata rantai antara dua kelompok masyarakat dimana ia memindahkan pengetahuan kebudayaan secara spesifik dan nilai-nilai serta perilaku atau tabiat dari satu kelompok masyarakat kepada kelompok masyarakat lainnya³⁵. Sehingga mereka juga memiliki peranan yang penting.

Ada keuntungan lain ketika orang Eropa memilih untuk tinggal dengan wanita pribumi, kenyataan pahit yang harus diterima oleh pemerintah Hindia Belanda yang melarang praktik pernyaaian. Perkawinan antara seorang Belanda dan istrinya di Hindia seringkali mandul, keguguran dan lahir mati. Heren XVII menambahkan: “padahal sebaliknya yang kita jumpai manakala laki-laki kita mengawini perempuan pribumi lahirlah anak-anak yang kuat dan tegap serta panjang umur”. Tingkat kematian rata-rata wanita Eropa di Timur lebih tinggi daripada pria Eropa.

2.4 Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda terhadap Praktik Nyai

Kedatangan orang Barat ke Nusantara, seperti Portugis, Spanyol, Belanda dan Inggris tidak bisa lepas dari munculnya nyai, perempuan pribumi yang hidup bersama orang Eropa dalam suatu hubungan Nyai. Kuatnya praktik pengambilan

³⁴ Susan Abeyesakere, dalam Hayu Adi Darmarastri, *Nyai Batavia*, Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2006, hlm. 65.

³⁵ Hayu Adi Darmarastri, *op.cit.*, hlm. 89.

Nyai di Hindia Belanda tidak berarti didukung oleh pemerintah dan masyarakat. Justru karena beberapa kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah saat itu, hal itu kemudian mempengaruhi pesatnya pertumbuhan pengambilan Nyai selama berabad-abad. Peraturan atau kebijakan pemerintah Hindia Belanda seringkali bergejolak dan tidak konsisten. Kadang-kadang praktek pengambilan Nyai memang ditentang keras, tetapi karena alasan-alasan yang menguntungkan penjajah, praktek pengambilan Nyai tidak dilarang atau bahkan dianjurkan. Perubahan kebijakan ini tentu saja dilihat dari segi keuntungan yang diperoleh para penjajah. Dikatakan bahwa fenomena Nyai sudah ada sebelum berdirinya VOC, yaitu pada masa kedatangan Portugis dan Spanyol ke Nusantara pada abad ke 16. Dapat dikatakan bahwa Nyai merupakan ciri penting masyarakat kolonial Portugis. Tetapi mutlak hal itu harus terjadi, karena jumlah perempuan Portugis yang dikirim ke Timur sangatlah sedikit. Pemerintah Portugis justru menggalakan perkawinan serdadu-serdadu dengan perempuan-perempuan setempat sejak sekitar tahun 1505 sampai 1515 semasa Rajamuda Dom Fransisco de Almeda dan penggantinya, Alfonso de Albuquerque³⁶. Pengambilan Nyai semacam ini masih bertahan hingga datangnya bangsa Belanda ke Nusantara.

1. Kebijakan Jan Pieterszoon Coen terhadap Praktik Pergundikan

Jan Pieterszoon Coen adalah pendiri Batavia setelah pada tahun 1619 Djakarta berhasil diduduki oleh VOC. Coen adalah Gubernur Jenderal VOC pada saat itu. Jabatan Gubernur Jenderal adalah seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan dan mengurus semua kepentingan VOC di Asia. Setelah mendirikan

³⁶ Leonard Blusse, *op.cit.*, hlm. 300.

Batavia, Coen berusaha mendirikan koloni kulit putih di tanah jajahan. Berbeda dengan upaya pemerintah Portugis untuk meningkatkan pernikahan tentara dengan wanita pribumi untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja di Asia dan menciptakan koloni di daerah jajahan, Coen tidak berharap terlalu banyak dari tentara. Bagi Coen, tentara bukanlah jenis yang tepat untuk membangun koloni.

Maraknya pengambilan Nyai pada masa itu yang terjadi di kalangan lelaki Belanda atau Eropa dengan perempuan pribumi sangat ditentang dan dibenci oleh Coen karena dianggap sebagai tindakan yang tidak pantas. Coen memang seorang yang terkenal sangat keras terhadap pelanggaran seksual³⁷. Kekerasannya ini terlihat pada sebuah kasus skandal seks di kalangan kastil Batavia, yakni hubungan gelap antara seorang serdadu bawahan berbangsa Belanda dengan Sara Specx, putri Jacques Specx³⁸ (Gubernur Jenderal yang sebelumnya menduduki jabatan tinggi VOC di samping sebagai anggota Dewan Hindia) dari selir Jepang. Ketika skandal tersebut terbongkar, serdadu yang melakukannya dihukum mati, sedangkan Sara Specx dihukum cambuk di muka umum³⁹.

Coen percaya bahwa perkawinan campuran yang terjadi antara Hindia Belanda atau orang Eropa dengan pribumi bukanlah cara yang tepat untuk membangun koloni kulit putih di koloni tersebut. Dalam beberapa surat yang ditulisnya kepada dewan pengurus di Amsterdam, Coen memaparkan ide-idenya tentang bagaimana mengisi kota Batavia. Ditegaskannya bahwa ia terpaksa mengambil langkah sementara dan membeli perempuan-perempuan budak dari

³⁷ Onghokham, *op.cit.*, hlm. 18.

³⁸ Onghokham, *op.cit.*, hlm 18-19.

³⁹ *Ibid.*

pantai India, karena pengurus agaknya tak berminat untuk membangun sebuah koloni⁴⁰.

Menurut Coen, perempuan adalah prasyarat dalam berdagang, “dasar negara di Hindia, Jika perempuan tersedia pasar-pasar perdagangan Hindia adalah milik anda”, tulisnya kepada Heren XVII (Opkomst Ivxxxiv)⁴¹. Maka Coen meminta kiriman anak-anak gadis serta mengusulkan agar banyak keluarga Belanda dari kalangan baik-baik untuk beremigrasi ke Batavia. Bersama keluarga dan anak-anak mereka ini disertakan pula sekitar empat sampai lima ratus anak laki-laki dan perempuan berusia 10 sampai 12 tahun, yang diambil dari semua rumah-rumah yatim-piatu di Verenigde Provincien, dengan perbandingan antara anak laki-laki dan perempuan diusulkannya 2:1⁴².

Anak-anak yatim piatu Belanda telah memenuhi kriteria Coen untuk membangun masa depan koloni. Coen mendukung terbentuknya wilayah pendudukan permanen untuk imigran dari Belanda. Bersama para pedagang dan tentara, para pendatang mampu membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang akan menciptakan ruang bagi petani, pengrajin, agamawan dan guru. Menurut Coen, anak yatim piatu, laki-laki dan perempuan, berhak menjadi warga negara baru di daerah jajahan karena tidak memiliki keluarga atau ikatan dengan tanah air. Karena itu, akan lebih mudah bagi mereka untuk berinteraksi dan beradaptasi dengan tempat-tempat di koloni.

⁴⁰ Leonard Blusse, *op.cit.*, hlm. 298.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 301.

⁴² *Ibid*.

Coen mengerti bahwa laki-laki di koloni harus mencari alternatif untuk menemukan pasangan hidup selain selir. Coen berpendapat bahwa isu tersebutlah yang menjadi penyebab munculnya kasus aborsi, pembunuhan bayi, dan terkadang aksi peracunan terhadap si tuan Eropa yang dilakukan oleh gundik yang cemburu⁴³. Ia pun meminta calon-calon pengantin perempuan kulit putih kepada Heren van de Compagnie⁴⁴.

Pengantin kulit putih yang diminta Coen harus menjadi gadis atau wanita muda yang baik dan lebih baik yang telah dididik secara ketat di panti asuhan. Sebelumnya, banyak wanita lajang dibawa ke Hindia Belanda. Mereka dipaksa untuk menikah dengan pejabat VOC di Timur dan imblannya menerima perjalanan gratis dengan mas kawin. Ide ini awalnya tidak dijawab oleh Heren XVII, sehingga Coen harus memulai usahanya sendiri dengan membeli perempuan-perempuan budak dari pantai India.

Tahun 1620, barulah Heren XVII mengabulkan permintaan Coen ditandai dengan adanya pengiriman sejumlah perempuan Eropa melalui kapal-kapal laut ke wilayah Timur⁴⁵. Gadis-gadis ini ditempatkan di keluarga, atau di sekolah-sekolah khusus yang didanai perusahaan dan di sana mereka diberi makan, dirawat, dididik sampai mereka mencapai cukup usia dan dapat menikah dengan suami yang baik, sehingga dari rumah-rumah ini mereka dapat menjadi keluarga. Mewarisi keluarga terhormat. Ide pokok dari rencana ini adalah untuk meningkatkan kualitas keluarga Belanda dan wanita Belanda khususnya, seperti sopan santun, kebersihan dan

⁴³ Hayu Adi Darmarastrri, *op.cit.*, hlm. 8.

⁴⁴ Reggie Baay, *op.cit.*, hlm. 2.

⁴⁵ Hayu Adi Darmarastrri, *loc.cit.*

ketakwaan. Upaya ini dilakukan untuk mendesak para istri keturunan Asia atau Indo yang sudah lebih dulu hadir di sini.

Permintaan dan peraturan-peraturan oleh Coen ternyata tidak terlalu efektif. Jumlah pergundikan di wilayah pendudukan tidak berkurang secara signifikan. Maka Coen mengeluarkan larangan bagi kaum lelaki Belanda atau Eropa untuk menikahi kaum perempuan pribumi seperti yang tercantum pada *Regering bij Plakaat* pada tahun 1625⁴⁶. Larangan Coen tidak bisa menghilangkan praktik pengambilan Nyai di Hindia Belanda, kebutuhan biologis di luar kebijakan pemerintah. Pengambilan Nyai baru benar-benar menghilang beberapa abad setelah kepemimpinan Coen, terutama seiring dengan kepergian orang-orang Eropa dari Indonesia. Sesudah masa Gubernur Jenderal Coen, sanksi terhadap hubungan di luar perkawinan yang sah pun sangat longgar⁴⁷. Ketika masa kompeni berganti dengan masa pemerintah Hindia Belanda, pernyaaian semakin meningkat. Kedatangan laki-laki Eropa dalam jumlah besar telah memperpanjang sejarah Nyai di Hindia Belanda.

2. Peraturan Kolonial tentang Perkawinan Campuran

Peraturan perkawinan campuran di Hindia Belanda diatur dalam Staatsblad 1898 No. 159. Beslit Kerajaan 29 Desember 1896 No. 23, S 1898/158. Peraturan tersebut memberikan definisi sebagai berikut; perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di bawah hukum yang berlainan yang ada di Indonesia. Hukum yang berlainan ini antara lain disebabkan karena perbedaan

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 9.

⁴⁷ Linda Christanty, *op.cit.*, hlm. 25.

kewarganegaraan, kependudukan dalam berbagai wilayah, golongan rakyat, tempat kediaman, atau agama. Maka perkawinan campuran dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu perkawinan campuran internasional, perkawinan campuran antar-regio, perkawinan campuran antar-tempat, perkawinan campuran antargolongan, dan perkawinan campuran antar-agama.

Praktik Nyai yang terjadi antara laki-laki Eropa dan pribumi jelas merupakan perkawinan campuran. Karena keduanya terpisah bukan hanya karena berbeda ras dan kebangsaan, tetapi juga karena berbeda golongan dan agama. Hukum kolonial tentang perkawinan campuran merupakan salah satu peraturan untuk menanggapi banyaknya perkawinan orang Eropa di Hindia Belanda dengan perempuan pribumi, baik yang diprakarsai oleh hubungan perkawinan maupun tidak.

Di sini hanya akan membahas lebih lanjut tentang perkawinan campuran antaragama, perkawinan campuran antargolongan, dan perkawinan antara orang-orang yang berkewarganegaraan berbeda. Hal ini dikarenakan mengingat bahwa bagi Indonesia sebagian besar terjadi hubungan semacam ini.

1) Perkawinan Campuran antartempat (*interlocal*)

Perkawinan campuran antar tempat terutama untuk perkawinan antara orang Indonesia sendiri yang berasal dari suku atau daerah yang berbeda dan hidup dalam lingkungan hukum yang berbeda. Misalnya perkawinan antara seorang wanita Batak dengan seorang Sunda, seorang Jawa dengan seorang wanita Lampung, dan sebagainya.

2) Perkawinan Campuran Antaragama (*interreligious*)

Tentang perkawinan antara orang-orang yang satu golongan tetapi berbeda agama, termasuk istilah perkawinan campuran dari GHR⁴⁸. Selama periode kompeni sampai tahun 1848, agama digunakan sebagai pedoman dalam hal perkawinan campuran. Sesuai dengan struktur masyarakat saat itu, agama yang dianut penguasa adalah agama Kristen, yang kemudian dianut sebagai pedoman.

Agama dipakai untuk melindungi golongan Belanda. Seorang Kristen tidak dapat menikah dengan seorang non-Kristen. Karena tak sesuai dengan keadaan zaman, pendirian ini dilepaskan dengan diterimanya pasal 15 Ov⁴⁹ dari 1948. Perbedaan agama tidak dapat dijadikan sebagai larangan perkawinan campuran. Sumber lain perkawinan beda agama adalah Ordonansi Kristen Indonesia untuk Jawa, Minahasa dan Ambonia, S. 1933/74 (HOCl). GHR itu juga berlaku untuk perkawinan antara orang Kristen dan non-Kristen yang termasuk dalam kelompok orang Indonesia.

Kristen dapat dianggap sebagai agama yang dianut oleh kasta tertinggi dalam masyarakat Hindia Belanda sebelum perang. Kekristenan dapat mengubah status garis keturunan, orang-orang kelas bawah dapat naik ke atas dengan memeluk agama Kristen. Umat Kristen Indonesia terlihat di perbatasan antar golongan. Jarak antara orang Eropa dan Kristen Indonesia tidak jauh. Kedudukan agama di sini dianggap penting dalam menentukan status sosial masyarakat Eropa. Orang Kristen sejati akan memperoleh kedudukan yang lebih tinggi di mata masyarakat Eropa, juga dalam hal perkawinan. Praktik pengambilan Nyai berkembang pesat karena

⁴⁸ GHR adalah singkatan dari *Regeling op de Gemengde Huwelijken, Koninklijk Bsluit van 29 Desember 1989 No 23, Staatsblad 1989 No 158.*

⁴⁹ Ov: *Bevelingen omtrent de invoering van-en den overgang tot de nieuwe wetgeving.*

larangan menikahi wanita pribumi non-Kristen. Karena pernikahan sulit dilakukan, orang Kristen Eropa dan wanita Muslim pribumi memilih hanya menjadi nyai.

3) Perkawinan Campuran Antargolongan (*intergentiel*)

Antar golongan disebut antar kasta, sedangkan masyarakat kolonial adalah istilah untuk masyarakat kasta. Istilah kasta dalam sosiologi digunakan untuk menunjukkan keberadaan tembok yang tidak dapat ditembus yang mencegah kebangkitan sosial seseorang. Tembok yang dimaksud adalah color line, karakteristik universal pertama dari kolonialisme. Tembok ini adalah fondasi dari semua masyarakat kolonial. Orang asing yang menjajah dipisahkan dari penduduk pribumi oleh dinding sosial yang tebal dan tinggi, yang hampir tidak bisa dilewati.

Akibat adanya tembok pemisah tersebut, masyarakat kolonial tetap berdiri tegak karena tidak ada kontak sosial antara kasta yang dijajah dengan kasta kolonial. Dalam percakapan sehari-hari, di jalan-jalan, di tempat nongkrong dan di tempat-tempat wisata, jarak antara pribumi dan orang kulit putih jelas. Ciri ini juga merupakan ciri masyarakat kolonial. Ciri-ciri tersebut dapat dikatakan ada pada setiap masyarakat yang terjajah, meskipun dengan berbagai variasinya. Hal ini juga ditemukan pada masyarakat Hindia Belanda, khususnya pada abad ke-19.

Di Hindia Belanda saat itu ada tiga kasta yang kehidupannya berbeda, yaitu kasta Eropa, kasta Timur Asing, dan Inlanders dalam (pribumi). Kasta Eropa penuh dengan perlindungan, sistem kehormatan, kemewahan yang ditampilkan, dengan banyak emas dan bordir, patung dan tanda kehormatan, yang tidak bisa digunakan oleh kasta lain. Kasta Eropa juga identik dengan tempat perkumpulan kelas atas,

tempat umum seperti penginapan dan pemandian yang hanya menerima orang Eropa.

Cukup jelas bahwa dalam suasana seperti itu dengan batas-batas ras yang sangat kuat dan kaku, dan kontak sosial yang buruk antar kasta. Hal ini terjadi karena dianggap melanggar hubungan kasta, sehingga perkawinan campuran tidak banyak terjadi. Orang Eropa yang melakukan perkawinan campuran tidak lagi dilihat oleh kastanya. Jika seorang Eropa ingin memiliki hubungan permanen dengan seorang wanita Indonesia, dia tidak menikah, tetapi mengambilnya sebagai nyai. Hanya jika mereka menarik diri dari hubungan sosial, demi anak-anak mereka dan untuk mendapatkan pensiun janda, orang Eropa berpikir tentang mengesahkan asosiasi campuran pada hadapan publik.

Hal ini karena adanya ketidaksepakatan sosial yang nyata di antara kasta-kasta Eropa yang satu bercampur, apalagi menikah dengan kasta terendah, yaitu pribumi. Keberatan-keberatan tersebut dapat berupa resiko pemecatan dari jabatan-jabatan tinggi, misalnya terdapat seorang dokter militer pandai berpangkat kolonel, karena kawin dengan “ibu dari anak-anaknya”⁵⁰ telah dipecat dari kedudukannya. Seorang residen yang hilang pamornya karena “ibu dari anak-anaknya” ini bertindak terang-terangan sebagai istrinya pada resepsi-resepsi dan pertemuan-pertemuan resmi hingga timbul ketegangan diantara istri-istri Eropa dari pejabat-pejabat pegawai negeri setempat.

⁵⁰ Istilah “ibu dari anak-anaknya” digunakan untuk menyebut kan seorang nyai, bahwa ia bukan istri yang sah bagi Tuan Eropa-nya tetapi seorang nyai melahirkan anak-anak dari Tuan Eropanya tersebut.

Hanya lapisan bawah kasta Eropa yang berani menikah dengan "ibu dari anak-anaknya", mengingat tindakan ini merusak diri sendiri. Pernikahan tersebut diatur dalam KB tanggal 29 Desember 1896 (S. 1896-158) yang telah beberapa kali diubah. Perkawinan ini diatur dalam KB tanggal 29 Desember 1896 (S. 1896-158) yang telah beberapa kali diubah. Pasal 2 KB tersebut menentukan bahwa seorang perempuan yang melangsungkan perkawinan campuran sejak saat perkawinannya itu mengikuti status suaminya, jadi seorang perempuan bukan Eropa yang kawin dengan seorang dari golongan Eropa, selama dalam perkawinannya tunduk pada hukum yang berlaku untuk suaminya, baik dalam hukum publik maupun dalam hukum sipil/perdata⁵¹. Hal inilah yang dianggap akan mengotori ras totok yang sangat menjunjung tinggi prinsip rasial mereka.

Sementara itu, perkawinan campuran antara wanita Eropa dan pria non-Eropa lebih jarang terjadi. Kuatnya budaya patrilineal di Hindia Belanda memaksa perempuan Eropa masuk kasta Inlander ketika mereka berani kawin campur dengan laki-laki Inlander. Bahkan perubahan status ini tetap berlaku setelah perkawinan itu terputus, apabila ia dalam waktu satu tahun setelah perceraian itu tidak menyampaikan pernyataan kepada Kepala Pemerintah setempat dimana ia bertempat tinggal, bahwa ia ingin kembali ke status semula⁵².

⁵¹ B. P. Paulus S.H., *Garis Besar Hukum Tata Negara Hindia Belanda*, Bandung: Penerbit Alumni, 1079, hlm. 77.

⁵² *Ibid.*